

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)**

Oleh:

Windu Wulan^{1)*}, Haura Atthahara¹⁾, Ani Nurdiani Azizah¹⁾, Harmiati²⁾, Mulyadi²⁾

*Email Korespondensi¹⁾: 1710631180154@student.unsika.ac.id

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa, Karawang
Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH, Bengkulu
Indonesia

Abstract

One of government's efforts to overcome poverty is to develop the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. In developing MSME sector the central government and local governments carry out a support system development program for MSMEs. One of them is Department of Cooperatives and SMEs Karawang Regency. However in practice, MSMEs in Karawang Regency have difficulties in developing their products, one of which is the lack of public interest in MSME products. The purpose of this study was to find out how to implement support system development program for MSMEs at the Department of Cppperatives and SMEs Karawang Regency by using the implementation indicators form Quade (Akib, 2010) namely 1) the disered policy, 2) the target group, 3) implementing organization, 4) environmental factors. The research methodology used in this research is descriptive qualitative. The results of the discussion of this study are the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SME) of Karawang Regency has implemented a support system depelovment program for MSMEs well, such as MSME actors in the promotion and marketing of their products through events or good activities organized by the local government. As well as other local governments as well as through cooperation carried out by private parties such as hotels modern shopping center or malls. However, in this implementation it is still influenced by environmental factors such as low public interest in MSME products.

Key Wards : Implementation; MSMEs; Karawang Regency

Abstrak

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam mengembangkan sektor UMKM, Pemerintah pusat serta Pemerintah daerah menjalankan program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM. Salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Namun dalam pelaksanaannya, UMKM di Kabupaten Karawang kesulitan dalam mengembangkan produknya yang salah satunya adalah kurangnya minat masyarakat bagi produk UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang dengan menggunakan indikator implementasi dari Quade (Akib, 2010, p. 4) yaitu 1) kebijakan yang diimpikan, 2) kelompok sasaran, 3) organisasi yang melaksanakan, 4) faktor lingkungan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang telah melaksanakan program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM dengan baik seperti memfasilitasi para pelaku UMKM dalam promosi serta pemasaran produknya melalui event-event atau kegiatan-kegiatan baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah lain serta melalui kerjasama yang dilakuka oleh pihak swasta seperti hotel dan pusat perbelanjaan modern atau mall. Namun, dalam pelaksanaannya masih di pengaruhi oleh faktor lingkungan seperti salah satunya rendahnya minat masyarakat terhadap produk UMKM.

Kata kunci: Implementasi; UMKM; Kabupaten Karawang

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, yang mana tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia dikategorikan berada dibawah standar dunia. Pada Maret 2019, Badan Pusat Statistika (BPS) merilis standar garis kemiskinan masyarakat Indonesia. Masyarakat miskin Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp. 14.175 setiap harinya atau sekitar 1 dollar AS, sedangkan standar kemiskinan dunia adalah 2 dollar AS pendapatan setiap harinya (Badan Pusat Statistik, 2019).

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka membangun perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik memberikan definisi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdasarkan pada banyaknya tenaga kerja. Suatu usaha yang memiliki 1 orang sampai 4 orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, usaha yang memiliki 5 orang sampai dengan 19 orang dikelompokkan sebagai usaha kecil. Sedangkan untuk usaha yang memiliki tenaga kerja 20 orang hingga 99 orang

dikelompokkan ke dalam usaha menengah (Wowor et al., 2020, p. 540). Dengan dikembangkannya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tingginya angka kemiskinan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh tingginya angka pengangguran yang mana dengan dikembangkannya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus kemiskinan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami kesulitan dalam proses pengembangan produk dan usahanya seperti contohnya mengenai promosi produk, pemasaran produk, status badan hukum serta perijinan.

Dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta upaya pemerintah mengatasi permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah menjalankan program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu pemerintah daerah yang menjalankan program tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang mana salah satu urusan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) Kabupaten Karawang adalah melakukan pengembangan serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Karawang mempunyai 9 program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) Kabupaten Karawang tahun 2016-2021. Salah satu program tersebut adalah Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai tujuan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Karawang tahun 2016-2021, yaitu:

1. Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan melalui intermediasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan lembaga keuangan dan Sumber pendanaan lainnya.
2. Terlaksananya expo produk Usaha Kecil, Menengah (UKM), gebyar UMKM, promosi dan corporative fair tingkat kabupaten dan provinsi, serta pembuatan leaflet.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya pada proses pemasaran serta promosi produk dikarenakan minimnya outlet yang dapat memasarkan produk olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang membuat para pelaku

UMKM kebingungan dalam memasarkan produk olahannya (Khumaini, 2017). Tidak hanya minimnya outlet yang dapat memasarkan produk, terdapat hal lain yang membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami kesulitan dalam mengembangkan produknya adalah dikarenakan masyarakat Kabupaten Karawang lebih tertarik melakukan transaksi pembelian di pasar modern atau *Supermarket*. Oleh karena itu, jika hal tersebut terus menerus terjadi maka akan mengakibatkan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami kesulitan dalam proses pengembangan serta pemasaran produk khususnya pada jenis makanan. Hal tersebut juga salah satunya dikarenakan sebagian besar produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang khususnya pada bidang pangan belum memiliki atau memenuhi aspek legalitas seperti Sertifikat Halal, Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (S-PIRT), Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan lain sebagainya. Padahal aspek legalitas merupakan salah satu syarat penting dalam memasarkan produk melalui Pasar Modern atau *Supermarket*. Tercatat bahwa dari jumlah 42.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai jenis usaha yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Karawang hanya 400 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memenuhi aspek legalitas.

Oleh karena itu dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program

pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Karawang. Pelaksanaan atau Implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kebijakan public dikarenakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia tanpa adanya implementasi (Abdoellah & Rusfiana, 2016, p. 57). Sedangkan menurut Quade (Akib, 2010, p. 4) alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam proses implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi dan reaksi terhadap faktor implementasi kebijakan. Quade juga menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi suatu interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan yang diikuti tawar menawar ataupun transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul ‘Implementasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)’. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang dalam

mengimplementasikan Program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Saryono (Nurdin & Hartati, 2019, p. 75) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan untuk mengetahui implementasi program pengembangan sistem pendukung umkm di Kabupaten Karawang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sedangkan untuk wawancara adalah suatu cara dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Nurdin & Hartati, 2019, p. 178). Sedangkan untuk sumber data, peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Siyoto & Sodik, 2015, p. 67).

Untuk data primer, peneliti mendapatkan melalui hasil wawancara serta observasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan, berita online dan lain sebagainya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi, peneliti menggunakan variabel yang dikemukakan oleh Quade. Menurut Quade dalam (Akib, 2010, p. 4) terdapat empat variabel yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis mengenai implementasi yaitu:

1. Kebijakan yang Diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan.
2. Kelompok Target, yaitu subyek yang dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui suatu kebijakan serta subyek harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Organisasi yang Melaksanakan, yaitu unit atau satuan pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
4. Faktor Lingkungan, yaitu suatu elemen sistem yang terdapat pada lingkungan yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka implementasi program

pengembangan sistem pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang menggunakan indikator Implementasi dari Quade (Akib, 2010, p. 4) adalah:

Kebijakan yang di Impikan

Kebijakan yang di Impikan yaitu dilihat dari pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan. Dalam implementasi program pengembangan sistem pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini merupakan suatu program yang diimpikan oleh masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang memberikan kemudahan terkait dengan sarana dan prasarana dalam proses promosi produk, desain kemasan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta informasi terkait dengan permodalan melalui program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM dalam proses pembuatan atau desain terhadap kemasan produk UMKM serta logo UMKM tersebut yang dilakukan secara gratis.

Mengenai informasi permodalan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang ini juga membantu para pelaku UMKM terhadap informasi permodalan melalui program ini seperti salah satunya mengenai Kredit Usaha

Rakyat (KUR) yang mana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang membantu para pelaku UMKM dengan cara membantu melengkapi berkas-berkas dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut.

Dalam promosi produk, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Karawang memanfaatkan sejumlah *event-event* atau kegiatan-kegiatan besar yang terdapat di Kabupaten Karawang. Seperti, *Karawang Creative Night* (KCN), Hut Kabupaten Karawang dan lain sebagainya. Dalam program ini, Dinas Koperasi dan UKM memberikan sarana serta prasarana untuk para pelaku UMKM dalam mempromosikan produknya seperti disediakan tempat atau stand yang dapat diisi oleh para pelaku UMKM dalam mempromosikan produknya secara gratis.

Tidak hanya melalui *event-event* tersebut, Dinas Koperasi dan UKM dalam mempromosikan produk UMKM melakukan kerjasama dengan beberapa tempat penginapan atau hotel-hotel yang terdapat di Kabupaten Karawang antara lain seperti Hotel Resinda serta Hotel Mercure. Promosi tersebut dengan cara melalui diciptakannya suatu tempat yang terdapat dalam Hotel tersebut untuk diisi oleh produk Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang diberi nama "Pojok UMKM". Dengan adanya "Pojok UMKM" tersebut diharapkan para turis yang sedang menginap atau berkunjung di beberapa tempat penginapan atau hotel di Kabupaten Karawang dapat mengenal beberapa produk olahan UMKM di Kabupaten Karawang. Tidak hanya

bekerjasama dengan tempat penginapan atau hotel dalam melakukan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Proses promosi produk Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) juga dilaksanakan di beberapa pusat perbelanjaan atau *mall* salah satunya bekerjasama dengan Mall Festive Walk Kabupaten Karawang melalui "UMKM Galerry".

Untuk promosi produk ke luar Kabupaten Karawang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang memanfaatkan undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lain dengan cara mengikutsertakan beberapa UMKM yang terdapat di Kabupaten Karawang untuk ikut serta dalam undangan kegiatan tersebut. Tidak hanya mengikutsertakan para UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang juga memfasilitasi sarana dan prasarana seperti tempat atau stand dan lain sebagainya secara gratis yang dapat digunakan oleh UMKM dalam mengikuti undangan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah luar Kabupaten Karawang. Agar produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat di Promosikan melalui tempat penginapan, pusat perbelanjaan serta kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lain, terdapat beberapa syarat yang terpenting adalah produk tersebut telah memenuhi aspek legalitas produk khususnya pada produk pangan.

Dalam proses promosi serta pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus dibarengi dengan aspek

legalitas terhadap produk khususnya pada produk pangan seperti Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (S-PIRT), Sertifikat Halal, ataupun Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang juga membantu para pelaku UMKM dalam proses pemenuhan aspek legalitas terutama pada para pelaku UMKM yang menjual produk jenis pangan yang mana hal tersebut terdapat pada program Pengembangan Iklim Usaha.

Untuk pemasaran produk UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang telah meresmikan galeri pusat oleh-oleh di Kabupaten Karawang yang bertempat dilingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Galeri tersebut berisikan produk-produk olahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Karawang.

Tidak hanya melalui galeri, Dinas Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah Kabupaten Karawang juga telah bekerjasama dengan salah satu *platform* belanja *online* yaitu Tokopedia dalam proses pemasaran produk. Pemanfaatan platform belanja

online tersebut dalam proses pemasaran produk sangat dibutuhkan pada saat ini. Selain memudahkan transaksi jual beli, hal tersebut juga salah satunya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak adanya *event-event* atau expo produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sarana promosi serta pemasaran produk. Semua proses kegiatan promosi serta pemasaran produk tersebut

dilakukan secara gratis dan para pelaku UMKM tidak dipungut biaya sepeserpun.

Namun dalam menjalankan program tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya mengenai permasalahan anggaran. Dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah kabupaten Karawang bahwa anggaran pada Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah berjumlah Rp. 367.601.000,-. Adapun rincian kegiatan pada anggaran program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel. 1 Rincian Kegiatan dan Anggaran

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan melalui intermediasi UMKM dengan lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya.	73.602.000,-
2.	Expo produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Gebyar UMKM, promosi dan	293.999.000,-

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	cooperative fair tingkat kabupaten, dan provinsi serta pembuatan leaflet	
	Jumlah	367.601.000,-

Sumber: Renja Dinkopukm Kab. Karawang, 2019

Minimnya anggaran pada Program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut merupakan salah satu penyebab program tersebut belum dirasakan secara menyeluruh oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang.

Kelompok Target

Kelompok Target yaitu dilihat dari subyek yang dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui suatu kebijakan serta subyek harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Kelompok target dalam program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM ini adalah para pelaku UMKM khususnya UMKM yang masih baru yang memerlukan pengembangan serta proses promosi produk ataupun informasi terkait permodalan. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, tercatat sebanyak kurang lebih sekitar 42.000 Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Untuk mendapatkan Program Pengembangan Sistem Pendukung

bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus terdaftar secara resmi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang. Untuk memudahkan proses pendaftaran, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang hadir lebih dekat dengan masyarakat khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pelayanan Administrasi Publik Terpadu Kabupaten (PATEN) yang dilaksanakan secara bergilir di tiap-tiap kecamatan. Hadirnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang pada program Paten bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum terdaftar secara resmi sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terhalang jarak tempuh untuk mendaftarkan usahanya secara resmi. Sehingga program Pengembangan Sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dirasakan secara menyeluruh oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut.

Organisasi yang Melaksanakan

Organisasi yang melaksanakan yaitu dilihat dari unit atau satuan pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Karawang merupakan organisasi yang utama yang menjadi implementator dalam menjalankan program tersebut. Namun, dalam menjalankan program tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang mengalami kekurangan sumber daya manusia. Diketahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 26 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana hampir seluruhnya adalah usia matang sehingga dalam menjalankan tugasnya terutama pada program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan dalam proses pembuatan desain logo serta kemasan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga diperlukan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam proses pembuatan desain logo serta kemasan produk tersebut.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut bertujuan agar program-program yang telah dibuat dapat terlaksana dengan pencapaian yang baik. Karena dalam sebuah suatu organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu program yang telah dirancang tersebut.

Tidak hanya Dinas koperasi dan

UMK Kabupaten Karawang, dalam program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini juga melibatkan beberapa organisasi atau instansi pemerintahan lain seperti salah satunya adalah Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karawang yang juga ikut membantu dalam implementasi program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan penyelenggaraan kegiatan atau *event-event* yang berada di Kabupaten Karawang seperti dalam menyelenggarakan kegiatan pameran batik yang menjadi suatu agenda setiap tahunnya, agenda *Karawang Creative Night (KCN)*, dan juga agenda workshop bagi para pelaku usaha untuk menciptakan produk lokal yang mencerminkan ciri khas yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam membantu mewujudkan program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan yaitu dilihat dari suatu elemen sistem yang terdapat pada lingkungan yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Dalam proses pengimplementasian program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu implementasi program tersebut antara lain seperti:

- 1) Masyarakat kurang mendukung mengenai produk UMKM dan lebih memilih menggunakan produk yang terdapat dalam pasar modern atau *supermarket* bahkan lebih memilih produk buatan luar negeri sehingga mengakibatkan para pelaku UMKM kesulitan dalam pengembangan produk dikarenakan kalah saing dengan produk-produk *Supermarket* dan produk luar negeri.
- 2) Melekatnya budaya instan dikalangan Para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang sehingga membuat para pelaku UMKM enggan mendaftarkan diri kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang dikarenakan khawatir dikenakan biaya serta persyaratan yang menyulitkan sehingga mengakibatkan UMKM tersebut tidak mendapatkan program-program yang terdapat pada Dinas Koperasi dan UMKM.
- 3) Masih sempitnya pemikiran masyarakat khususnya generasi milenial dalam berwirausaha. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Karawang memiliki sedikitnya 5 kawasan industri sehingga generasi muda mempunyai pemikiran seperti “kerja diperusahaan sebagai karyawan lebih menjamin daripada membuka usaha sendiri”.
- 4) Lahan atau tempat juga mempengaruhi dalam implementasi program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM ini, seperti belum adanya

pengembangan terkait pemukiman bagi *home industry*.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian Implementasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori implementasi menurut Quade (Akib, 2010, p. 4) bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Karawang telah melaksanakan program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang yaitu seperti menyelenggarakan *event-event* atau kegiatan-kegiatan baik yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang ataupun yang diselenggarakan diluar Kabupaten Karawang, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerjasama dengan pihak swasta seperti tempat penginapan serta pusat perbelanjaan modern atau *mall* yang berada di Kabupaten Karawang. Hal tersebut diperuntukkan untuk proses promosi serta pemasaran produk UMKM.

Dalam program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi sasaran dalam program ini adalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya yang berada di daerah kabupaten Karawang yang baru saja merintis UMKM dan memerlukan pengembangan terhadap usahanya. Sedangkan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang merupakan implementator utama dalam program tersebut yang dibantu oleh beberapa instansi pemerintah lain seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam menyelenggarakan suatu event atau kegiatan di Kabupaten Karawang. Namun dalam pelaksanaannya, Masih banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi program ini di Kabupaten Karawang seperti rendahnya minat masyarakat terhadap produk UMKM, melekatnya budaya instan di kalangan para pelaku UMKM yang membuat para pelaku UMKM enggan mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Karawang sehingga mengakibatkan pelaku UMKM tersebut sulit mendapatkan program tersebut, dan lain sebagainya.

Rekomendasi/Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Penambahan sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Karawang agar proses implmentasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang khususnya pada wilayah yang jauh dengan
3. Segera merancang kembali anggaran agar implementasi program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dirasakan secara merata oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Karawang.
4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih menghargai serta memilih produk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. ALFABETA.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 1–11.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In Lutfiah (Ed.), *Jakarta: Bumi Aksara*. Media Sahabat Cendekia. https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi_penelitian_sosial.pdf
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). DASAR METODOLOGI PENELITIAN. In Ayup (Ed.), *Literasi Media Publishing* (Cetakan 1). Literasi Media Publishing.
- Wowor, B. M. E., Kindangen, P., Pondaag, J., Wowor, B. M. E., Kindangen, P., & Pondaag, J. (2020). ANALISIS DAYA SAING PRODUK PADA USAHA KECIL MENENGAH THE MANGO MANADO ANALYSIS OF PRODUCT COMPETITIVENESS IN THE MANGO MANADO SMALL AND *Jurnal EMBA* Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 538-548. *Jurnal EMBA*, 8(4), 538–548.

Media Massa dan Media Sosial

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil*

Kemiskinan Indonesia 2019.

<https://www.bps.go.id/pressreleases/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>

Khumaini, M. A. (2017, November 15). Ini Kendala UKM Karawang Kesulitan Memasarkan Produk. *Antaranews.Com*.
<https://megapolitan.antaranews.com/berita/34831/ini-kendala-ukm-karawang-kesulitan-memasarkan-produk>

Dokumen Resmi dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang mana salah satu urusan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2019.